

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Implementasi kebijakan yaitu upaya dalam rangka tercapainya tujuan tertentu melalui sarana dan dalam waktu tertentu. Suatu kebijakan yang telah dirumuskan kemudian dilaksanakan dan diimplementasikan supaya memiliki dampak atau tujuan seperti yang diinginkan. Terdapat banyak variabel yang mampu mempengaruhi berhasilnya atau tercapainya sebuah kebijakan baik itu sifatnya individual, kelompok maupun institusi. Kompleksitas implementasi tidak hanya dibuktikan dari berapa banyak aktor dan organisasi yang terlibat, tetapi juga karena proses implementasi dipengaruhi oleh banyak variabel yang kompleks, baik variabel individu maupun variabel organisasi, dan masing-masing variabel tersebut saling mempengaruhi. (Subarsono, 2015).

Seorang anak adalah bentuk investasi suatu bangsa dan sebagai salah satu indikator bagi suatu bangsa dan negara dalam keberhasilannya melaksanakan pembangunan. Anak merupakan bentuk peradaban dan pemilik masa depan. Pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari pemberdayaan bangsa dan negara yang merupakan bagian dari pembangunan masyarakat internasional (*worldwide development*). Kondisi krisis ekonomi yang dialami Indonesia, menimbulkan berbagai masalah sosial yang dibutuhkan penanganan serius, salah satunya adalah masalah pekerja anak. Indonesia sendiri adalah salah satu negara yang tingkat pekerja anaknya cukup tinggi. Isu pekerja anak merupakan isu yang

sangat serius karena hal ini dapat mengancam tercukupinya hak anak. Pekerja anak dapat mengakibatkan anak putus sekolah, putus sekolah bahkan membahayakan dirinya sendiri, dengan dampak yang kurang optimal bagi tumbuh kembang anak (Kompas.com, 2021).

Manurung (1998) berpendapat bahwa partisipasi anak dalam kegiatan ekonomi baik di sektor formal maupun informal berpotensi untuk dieksploitasi. Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi Finlandia (2011) menyatakan bahwa pekerja anak mengacu pada eksploitasi pekerja anak untuk upah rendah tanpa mempertimbangkan perkembangan pribadi, keselamatan, kesehatan, serta masa depan anak. Fenomena pekerja anak di Indonesia bukanlah hal baru, melainkan masalah klasik. Rumah tangga miskin adalah keluarga yang secara finansial tidak mampu memenuhi kebutuhannya dan secara kolektif mengerahkan sumber daya keluargadalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga kondisi ini mendukung anak-anak yang belum cukup umur untuk dipaksa bekerja.

Berdasarkan data terkini dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan UNICEF, menunjukkan jumlah pekerja anak di seluruh dunia naik menjadi 160 juta. Jumlah tersebut naik sebanyak 8,4 juta selama empat tahun terakhir dan jutaan lebih anak berisiko terkena dampak Covid-19 (*International Labour Organization*, 2021). Data tersebut telah memperlihatkan angka peningkatan yang cukup signifikan terkait jumlah anak yang berusia lima sampai sebelas tahun yang kemudian menjadi pekerja anak, yang saat ini jumlahnya melebihi setengah total angka global. Jumlah anak yang berusia lima sampai tujuh belas tahun yang

didefinisikan sebagai pekerja anak yang tergolong dalam pekerjaan yang berbahaya yakni pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moralitas seorang anak. Sejak 2016, jumlah tersebut sudah meningkat sebanyak 6,5 juta menjadi 79 juta. Laporan tersebut juga memprediksi terdapat 9 juta anak tambahan yang secara global mampu dapat terkena resiko masuk sebagai pekerja anak pada akhir tahun 2022 yang diakibatkan adanya pandemi. Peningkatan akibat dampak ekonomi dan penutupan sekolah akibat COVID-19 dapat mengakibatkan anak-anak yang sudah menjadi pekerja anak bekerja lebih lama atau bekerja dalam kondisi yang lebih buruk. Di sisi lain, masih banyak lagi anak-anak yang terpaksa menjadi pekerja anak dalam kondisi terburuk akibat hilangnya pekerjaan dan pendapatan bagi keluarga rentan.

Jumlah pekerja anak di Indonesia meningkat selama tiga tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 menunjukkan terdapat 1,2 juta pekerja anak di Indonesia, dan pada tahun 2019 jumlahnya meningkat 0,4 juta menjadi sekitar 1,6 juta. Pada tahun 2020, angka kemiskinan diperkirakan akan meningkat menjadi 12,4 persen, memberikan kesempatan bagi sekitar 11 juta anak dari rumah tangga rentan untuk bekerja sebagai pekerja anak (The SMERU Reserch Institute). Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), 1,17 juta anak berusia antara 10 dan 17 tahun akan bekerja di Indonesia pada tahun 2020, lebih banyak 320.000 dari tahun sebelumnya. . Terlebih, semasa pandemi Covid-19, berdasarkan hasil pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah anak yang mengalami putus sekolah semakin tinggi terutama pada anak yang berasal dari keluarga miskin.

Krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan jumlah pekerja dewasa di beberapa sektor, selain angka kematian yang relatif tinggi dan akses teknologi informasi dan komunikasi yang tidak merata untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) mampu mengakibatkan meningkatnya resiko lahirnya pekerja anak baru selama pandemi.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada 2019 terdata masih terdapat sekitar 1,6 juta anak antara usia 10 dan 17 tahun yang terpaksa bekerja . apabila dilihat dari jenis kelaminnya, data dari Lokadata.id menunjukkan pekerja anak laki-laki mendominasi jumlah pekerja anak di semua wilayah, yang berjumlah sekitar 987 ribu atau 63%, sisanya berjenis kelamin perempuan sebanyak 569 ribu. Kabupaten Magelang adalah salah satu daerah yang masih ditemui banyaknya kasus pekerja anak yang dibuktikan dengan hasil riset oleh Petugas Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah, yang mana setiap tahunnya mengalami fluktuasi.

Tabel 1.1.

Jumlah Pekerja Anak di Kabupaten Magelang

TAHUN	JUMLAH PEKERJA ANAK
2015	150 anak
2016	63 anak
2017	120 anak

Sumber : Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Magelang 2018

Berdasarkan hasil tersebut, rata-rata pekerja anak ditemukan pada sektor informal (tambang pasir, peternakan ayam, proyek bangunan, kuli panggul, penjaga toko dan lain-lain). Pekerja anak merupakan masalah yang sangat serius di Indonesia karena kebanyakan dari mereka bekerja di sektor informal dan jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Pekerja anak di Kabupaten Magelang seharusnya waktu mereka digunakan untuk menempuh pendidikan. Hal ini karena situasi pekerja anak dapat menghambat anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan mendapatkan pekerjaan yang layak dimasa depan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, Persentase anak yang bekerja usia 10-17 di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi yakni pada tahun 2019 sebesar 2,17%, mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 2,31%, dan tahun 2021 sebanyak 2,26%. Data hasil Susenas Kabupaten Magelang pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pekerja anak terus dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, dengan proporsi pekerja anak laki-laki lebih tinggi daripada pekerja anak perempuan. Proporsi pekerja anak laki-laki sebesar 6,60% sedangkan proporsi pekerja perempuan sebesar 2,84%.

Sementara, data yang dilansir dari BPS pada tahun 2015 – 2017 pada Kabupaten Magelang Jawa Tengah menunjukkan masih banyaknya persentase anak putus sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) menurun beberapa persen dari tahun ke tahun tetapi pada tahun 2017 angka putus sekolah jenjang SMA meningkat. Dari data BPS tersebut dapat diketahui angka putus sekolah di Kabupaten Magelang menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2.

**Angka Putus Sekolah Kabupaten Magelang Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2015 – 2017**

TAHUN	SD	SMP	SMA
2015	26,80%	41,59%	76,24%
2016	15,88%	29,87 %	63,84%
2017	11,98%,	27,45%	75,45%

Sumber : BPS Kabupaten Magelang Jawa Tengah Tahun 2015 - 2017

Meskipun pekerja anak telah dilarang di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada kenyataannya implementasinya dalam menuntaskan masalah-masalah terkait pekerja anak memang tidaklah mudah. Adapun upaya perlindungan hukum untuk pekerja anak oleh Pemerintah Kabupaten Magelang telah diatur dalam regulasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Pemerintah Kabupaten Magelang dalam upaya Perlindungan hukum bagi pekerja anak menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya berdasarkan pertauran-peraturan berikut :

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan dan Diskriminasi. Peraturan Daerah ini memberikan Kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang untuk memeberikan Perlindungan kepada Anak dan menghapuskan segala bentuk eksploitasi terhadap anak.

2. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Didalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

3. Peraturan Bupati No 26 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Magelang.

Pemerintah melakukan upaya dengan menerbitkan UU No. 1 Tahun 2000, terkait Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) kemudian diganti dengan Kepres No. 12 Tahun 2001 dan Perumusan Rencana Aksi Nasional (RAN) melalui Kepres No. 59 Tahun 2002. Salah satu upaya percepatan pelaksanaan RAN – PBPTA adalah adanya Kebijakan program Pengurangan Pekerja Anak dalam Rangka Mendukung Keluarga Miskin (PPA-PKH). Program tersebut adalah salah satu upaya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berfokus pada Pengurangan pekerja anak dan Putus Sekolah dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan tujuan dikembalikan ke pendidikan melalui upaya pendampingan. Fokus program adalah anak-anak yang bekerja antara usia 13 dan 17 tahun, karena mereka masih anak-anak dan tidak terlalu muda serta masih mengenyam pendidikan yang diperlukan.

Tujuan program PPA-PKH adalah untuk mengurangi jumlah pekerja anak yang karena kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, harus meninggalkan

sekolah dan pulang ke rumah. Mereka berasal dari rumah tangga yang sangat miskin dimana mereka kemudian dibawa keluar dari tempat kerja untuk masuk kembali ke dunia pendidikan sebagai bagian dari proses pendampingan. Adapun program tersebut dibentuk dikarenakan berbagai alasan dan untuk menjawab permasalahan seperti : 1) besarnya jumlah pekerja anak di Indonesia, 2) komitmen pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 182 yang melarang pekerja anak dan segera mengambil tindakan untuk menghapuskannya, 3) pelaksanaan ratifikasi Konvensi ILO No. 182 untuk mempersiapkan aksi nasional menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak melalui Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002, 4) Berdasarkan Keputusan Presiden RI N 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Dewan Negara Tahun 2008, Kementerian Tenaga Kerja dan Transigrasi melaksanakan program pengurangan pekerja anak untuk mendukung peningkatan program “Keluarga Harapan”.

Program yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah ini membantu pekerja anak yang bertujuan untuk memotivasi anak agar memiliki keinginan dan kesempatan untuk kembali mengenyam pendidikan melalui fasilitas dan program dari berbagai lembaga pendidikan. Penerima manfaat PPA-PKH yang dimaksud adalah pekerja anak berusia antara 7 sampai 18 tahun yang keluar dari program keluarga harapan. Hasil dari langkah-langkah tersebut adalah penurunan jumlah pekerja anak di RTSM dan peningkatan partisipasi anak dalam belajar. Upaya mengembalikan pekerja anak ke dalam dunia pendidikan memerlukan strategi dan pendekatan yang berbeda, karena pekerja anak biasanya sudah lama putus sekolah dan melekat di lingkungan kerja

sehingga meninggalkan berbagai kendala (kurang percaya diri, kelemahan, motivasi) karena pekerja anak diperlukan agar mereka dapat termotivasi untuk kembali ke pendidikan.

Adapun Kementerian Tenaga Kerja telah melakukan lima upaya dalam rangka menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Upaya pertama yakni melalui peningkatan pemahaman dengan melakukan sosialisasi kepada dunia usaha serta masyarakat tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Yang kedua, melaksanakan berbagai program dalam rangka upaya pencegahan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak diantaranya Program Zona atau Kawasan Bebas Anak 8 Pekerja Anak dan Kampanye Menentang Pekerja Anak. Upaya yang ketiga yakni melaksanakan Program Pengurangan Pekerja Anak (PPA). Dilansir dari *Kompas.com*, dari ketiga upaya tersebut, Kementerian Tenaga Kerja telah melaksanakan Program Pengurangan Pekerja Anak dari tahun 2008 hingga 2020 dan telah berhasil menarik sebanyak 143.456 pekerja anak dari tempat kerja.

Kementerian Tenaga Kerja mengambil lima tindakan untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Upaya pertama adalah meningkatkan pemahaman dengan mengedukasi dunia usaha dan masyarakat umum tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Kedua, pelaksanaan berbagai program pencegahan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk delapan zona bebas pekerja anak, atau program zona dan kampanye anti pekerja anak. Proyek ketiga adalah pelaksanaan Program Pengurangan Pekerja Anak (PPA).

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Andhi, Nur Rahmadi (2019) dengan judul “Implementasi PPA-PKH di Kabupaten Probolinggo 2013 (Penarikan pekerja anak ke sekolah formal)” menunjukkan bahwa implementasi Program PPA-PKH di Kabupaten Probolinggo masih belum berjalan dengan baik karena masih terdapat kesenjangan pelaksanaannya antara pemerintah pusat, kabupaten dan daerah serta informasi penerima manfaat program masih belum jelas. Ketika pusat dilaksanakan, informasi akan datang dari PKH UP yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

Penelitian lain yang ditulis oleh Dewi Rostyaningsih (2015) berjudul “Implementasi Program Penarikan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang” menunjukkan bahwa implementasi program PPA-PKH di Kabupaten Magelang dalam produktivitas kelompok sasaran telah berhasil memenuhi target, hal ini dibuktikan dengan program PPA-PKH di Kabupaten Magelang telah mampu mengembalikan sebanyak 60% anak yang bekerja ke sekolah formal atau sekolah non formal.

Dari latar belakang permasalahan di atas, beberapa isu penting dapat diidentifikasi seperti masih banyak fenomena pekerja anak di Kabupaten Magelang seperti anak jalanan Terminal Tidar kota Magelang yang sudah menjadi pemandangan umum di masyarakat pengguna terminal. Setiap hari banyak anak jalanan yang melakukan aktivitasnya untuk mencari uang. Situasi ini rentan terhadap perlakuan kasar, penyalahgunaan seperti kekerasan fisik, keterlibatan dalam kejahatan, kecanduan narkoba dan hal-hal lain yang merugikan masa depan bangsa. Selain itu, masih banyak industri maupun *home industry* yang masih

mempekerjakan anak dalam produksi barang atau jasa. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Magelang masih banyak pengusaha yang mengeksploitasi tenaga kerja anak karena upah tenaga kerja anak sangat rendah dan tenaga atau biaya tenaga kerja tenaga kerja anak sangat tinggi.

Masalah eksploitasi yang dihadapi oleh pekerja anak sendiri tidak hanya terkait dengan upah, tetapi juga jam kerja yang panjang, risiko kecelakaan dan gangguan kesehatan, serta dapat berujung pada pelecehan dan eksploitasi terhadap orang dewasa. Menurut beberapa penelitian, mayoritas pekerja anak bekerja lebih dari 7 jam sehari. Menurut UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, anak di bawah 12 tahun tidak diperbolehkan bekerja, usia 13-14 tahun hanya 3 jam sehari dan usia 15-17 tahun 8 jam sehari, tetapi dalam kondisi fisik. tidak dapat diterima dan berbahaya secara psikologis. Kenyataan di lapangan mayoritas pekerja anak berusia 13 sampai 14 tahun dan bekerja rata-rata 6 sampai 7 jam sehari. Faktanya, banyak dari anak-anak tersebut bekerja di wilayah yang berbahaya dan tidak manusiawi bagi anak-anak. Masalah lainnya adalah masih banyaknya anak yang putus sekolah di kalangan keluarga miskin di Kabupaten Magelang, hal ini menunjukkan masih banyak anak yang belum mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya.

Kondisi pekerja anak sangat berpengaruh bagi kondisi fisik, psikis dan sosialnya. Hal ini dikarenakan anak yang bekerja pada usia muda, berada dalam posisi yang rentan serta jika anak harus bekerja, maka hal tersebut mampu menghambat perkembangan kepribadian seorang anak dan pada akhirnya mampu

menghambat tumbuh kembang anak tersebut (Sumadi Suryabrata, 1982; Asril Aini, 1982).

Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “IMPLEMENTASI PROGRAM PENGURANGAN PEKERJA ANAK – PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN MAGELANG” untuk melihat apakah implementasi program PPA-PKH sebagai upaya untuk mengurangi jumlah pekerja anak dan terpenuhinya hak pendidikan anak di Kabupaten Magelang telah dilaksanakan dengan baik dalam mewujudkan pemberdayaan terhadap anak putus sekolah yang menjadi pekerja anak di Kabupaten Magelang.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan di Kabupaten Magelang?.
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan di Kabupaten Magelang?.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang.

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan di Kabupaten Magelang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Maksud dari penelitian ini diharapkan mampu memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

a. Kegunaan secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang administrasi publik terkait pemberdayaan anak melalui strategi kebijakan publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu administrasi publik.

b. Kegunaan secara praktis

Secara praktis penelitian ini memiliki kegunaan untuk :

- 1) Penelitian ini mampu memberikan kontribusi melalui informasi berbagai pihak terkait pemberdayaan anak putus sekolah melalui Kebijakan Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta pengetahuan yang berkaitan dengan kajian ilmu Administrasi Publik tentang Kebijakan Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan serta sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah terkait pemberdayaan anak putus sekolah.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Tinjauan Teori Administrasi Publik

Istilah "administrasi publik" terdiri dari dua suku kata: "administrasi" dan "publik". Dalam bahasa Belanda administrasi adalah “administratie” yang berarti “manajemen” atau “dokumen kerja”. Dalam bahasa Inggris, administrasi berasal dari kata ad yang berarti intensif dan menteri yang berarti melayani. Oleh karena itu manajemen berarti menyediakan layanan intensif. Kata publik sendiri dalam bahasa Yunani pubos artinya matang, dan koino artinya. Publik juga dapat diartikan sebagai praja atau bangsa, pelayanan publik berarti pelayan rakyat. Kata “publik” juga berarti “poli” atau “politik”, yang berarti politik, negara dan pemerintahan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, khalayak adalah sekelompok besar individu yang memiliki kesamaan pikiran, perasaan, keinginan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan norma.

Pengertian Administrasi Publik menurut istilah, dibagi menjadi 3 yaitu :

- a. *Administration of public* (administrasi dari publik), Administrasi bertindak sebagai satu-satunya perwakilan kekuasaan, sebagai pengatur, selalu aktif dan proaktif.
- b. *Administration for public* (administrasi untuk publik), Negara berperan dalam misi pelayanan, pelayanan yang diberikan bersifat responsif dan tanggap.
- c. *Administration by public* (administrasi oleh publik), Administrasi diarahkan untuk memperkuat masyarakat dan menghargai kemandirian dan efisiensi masyarakat.

Nigro dan Nigro (1980) mendefinisikan Administrasi publik adalah segala sesuatu yang dilakukan pemerintah (khususnya cabang eksekutif) melalui sarana birokrasi untuk memecahkan masalah sosial atau publik. Sedangkan Felix A. Nigro membedakan administrasi publik ke dalam beberapa definisi yaitu : (1) kooperasi perusahaan kelompok dalam lingkungan pemerintahan; (2) Mencakup tiga bagian eksekutif, yudikatif dan legislatif serta hubungan antara ketiga bagian tersebut. (3) Berperan penting dalam membentuk kebijakan publik dan bagian dari proses politik. (4) Sangat berbeda dengan manajemen swasta. (5) Berhubungan erat dengan kelompok swasta dan individu dalam memberikan layanan masyarakat.

Menurut Nicholas Henry (2008:8) Dalam buku Deddy Mulyadi, ia mendefinisikan administrasi sebagai kombinasi kompleks antara teori dan praktik yang memperkuat pemahaman pemerintah terhadap masyarakat yang berkuasa dan membuat kebijakan publik lebih peka terhadap masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendorong kebutuhan. Pemerintah berusaha melembagakan praktik pengelolaan agar tetap berpegang pada nilai-nilai efektivitas dan efisiensi. Menurut Chandler and Plano (2008:3) dalam buku Deddy Mulyadi, Administrasi adalah proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya dan personel publik untuk perumusan, implementasi, dan pengelolaan keputusan kebijakan publik.

1.5.2. Tinjauan Teori Paradigma Administrasi Publik

a. The Old Public Administration

Konsep paradigma *The Old Public Administration* ditujukan untuk melakukan

kebijakan dan pemberian pelayanan yang netral dan profesional. Konsep ini medeskripsikan sistem pemerintahan mempunyai struktur mengikuti model bisnis, yaitu, untuk secara efisien melaksanakan kekuasaan, kontrol, dan kegiatan administratif untuk mencapai tujuan, yang sangat penting untuk memiliki struktur organisasi hierarkis. Ada dua poin penting untuk memahami paradigma *The Old Public Administration*, yang pertama terdapat jelasnya perbedaan antara politik dan administrasi. Kedua, memperhatikan struktur dan strategi yang mengatur hak-hak pengelola (pimpinan) lembaga publik sehingga tugas dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Adapun gagasan inti dari paradigma *The Old Public Administration* dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus pemerintah adalah pada pelayanan langsung oleh instansi pemerintah yang berwenang.
2. Kebijakan publik dan administrasi berurusan dengan desain dan implementasi langkah-langkah guna tercapainya tujuan politik
3. Pemerintah menjalankan peran lebih kecil dalam proses kebijakan daripada implementasi kebijakan publik.

b. New Public Management

Paradigma *New Public Manajemen* ini muncul ketika melihat bahwa paradigma terdahulu yaitu *Old Public Administration* masih kurang efektif dalam melakukan pemecahan masalah dan memberikan pelayanan publik, termasuk dalam pembangunan masyarakat. Paradigma ini didasarkan pada teori pasar sektor publik dan budaya perusahaan (Vigoda, 2002).

Dalam paradigma *New Public Management* para pemimpin harus

menemukan cara dan terobosan baru guna mencapai hasil maksimal atau untuk memprivatisasi fungsi pemerintahan. Mereka tidak lagi mereduksi segalanya menjadi jenis pekerjaan yang lebih kecil. Mereka tidak lagi menyapu semua pekerjaan. Sebaliknya, mereka melakukan "tata kelola," atau aktivitas yang memandu, mengarahkan, dan mengendalikan strategi . Oleh karena itu, kunci dari *New Public Management* adalah sangat menempatkan banyak penekanan mekanisme pasar tata kelola program publik. Konsep New Public Management dilihat sebagai konsep baru yang bertujuan untuk menghilangkan monopoli pelayanan yang tidak efisien dari otoritas pejabat.

c. New Public Service

Dalam paradigma ini, semua aktor berpartisipasi dan tidak ada yang hanya menjadi penonton. Di sini, pemerintah harus memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan menjamin hak-hak warganya dan mengutamakan kepentingan masyarakat. *New Public Service* menilai aparatur negara bukanlah aktor utama dalam membentuk kepentingan publik. Lembaga administrasi publik adalah aktor penting dalam sistem pemerintahan yang lebih luas yang terdiri dari warga negara, kelompok, anggota parlemen, dan lembaga lainnya. Administrasi publik memiliki tugas untuk mempromosikan forum dialog publik. Argumen ini menyangkut peran dan tanggung jawab pemerintah, yang bertujuan tidak hanya untuk mencapai tujuan ekonomi, tetapi juga nilai-nilai yang mengekspresikan kebaikan bersama, seperti kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan. Pada aspek pelayanan, memandang bahwa pengguna adalah warga masyarakat atau rakyat.

1.5.3. Tinjauan Teori Kebijakan

James E. Anderson (1978) merumuskan politik sebagai suatu rangkaian tindakan yang dipertimbangkan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam kaitannya dengan masalah atau masalah yang dihadapi. Ilmuwan politik Carl Friedrich, sebaliknya, menyatakan bahwa politik adalah kegiatan yang, di bawah rintangan tertentu, mengarah pada tujuan yang ditentukan oleh individu, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dan mencari cara untuk menemukan tujuan atau mencapai tujuan yang diinginkan (Friedrich Wahab, 2004:3). Menurut David Easton, kebijakan pemerintah adalah kewenangan untuk menambah nilai bagi masyarakat secara keseluruhan (Easton dalam Lubis, 2001:8). Kebijakan Umum Thomas Dye (1981:1) adalah segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Dalam penelitian ini, istilah “kebijakan” mengacu pada Kebijakan Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) untuk memberdayakan anak putus sekolah di Kabupaten Magelang. Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) sendiri adalah kegiatan untuk menarik pekerja anak baik yang berasal dari rumah tangga sangat miskin (RTSM) maupun anak putus sekolah untuk kembali ke satuan pendidikan dengan memberikan pendampingan shelter serta pendampingan komunitas. Program tersebut diharapkan dapat menurunkan jumlah pekerja anak khususnya di Kabupaten Magelang.

1.5.4. Tinjauan Teori Implementasi Kebijakan

Grindle menyatakan bahwa “implementasi adalah proses manajemen umum yang dapat dipelajari pada tingkat program tertentu” (Mulyadi, 2015:47). Sementara itu, Meter dan Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah dan individu untuk mencapai tujuan yang telah diputuskan dalam keputusan kebijakan sebelumnya (Ratri, 2014:4). Artinya proses implementasi tidak dapat dilakukan sebelum peraturan perundang-undangan diundangkan dan dana telah dialokasikan untuk proses implementasi. Selain itu, implementasi kebijakan dianggap sebagai proses, keluaran, atau fenomena kompleks yang dapat dipahami sebagai hasilnya.

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2007:49) bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan politik yang mendasar, yang biasanya berupa undang-undang tetapi dapat juga berupa peraturan atau keputusan penting dari badan administratif atau badan hukum lainnya. Tujuan yang dapat dicapai untuk menyusun atau mengatur proses implementasi dengan cara yang berbeda. Dapat kita simpulkan bahwa implementasi suatu kebijakan adalah upaya untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tujuan mencapai atau mencapai hasil akhir yang telah ditetapkan untuk tujuan kebijakan tersebut.

Keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri ditentukan oleh banyak variabel atau faktor yang saling terkait. Menurut Donald S. van Meter dan Carl E. Van Horn (1975), terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

1. Standar dan sasaran kebijakan.

Standar dan tujuan politik harus jelas dan terukur agar dapat diimplementasikan. Ketika tujuan standar dan kebijakan adalah untuk menghindari multitafsir dan menciptakan konflik antar aktor implementasi

2. Sumber daya

Implementasi kebijakan tentu harus didukung oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non manusia (*non human resources*).

3. Karakteristik agen pelaksana

Di sini, karakteristik agen penegak meliputi birokrasi, norma, dan pola hubungan khusus birokrasi yang mempengaruhi pelaksanaan program.

4. Disposisi Implementor

Disposisi implementor menyangkut 3 hal yaitu : (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya dalam melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan; (c) intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh disposisi implementor.

5. Hubungan antar organisasi

Menerapkan kebijakan atau program memerlukan dukungan dan koordinasi dengan otoritas publik. Oleh karena itu, keberhasilan program memerlukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga

6. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

Variabel-variabel tersebut meliputi sumber daya lingkungan dan ekonomi yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana

sekelompok pemangku kepentingan membantu implementasi kebijakan, karakteristik peserta, sifat opini publik di lingkungan, dan elite politik, termasuk ada tidaknya dukungan politik.

1.5.5. Tinjauan Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan dalam bahasa diartikan sebagai tindakan, proses, cara, keberdayaan, yaitu kesanggupan melakukan sesuatu atau kesanggupan bertindak berupa akal, usaha atau usaha (Depdiknas, 2003). Menurut Sadan, pemberdayaan juga diartikan sebagai proses peralihan dari keadaan tidak berdaya ke keadaan relatif menguasai kehidupan, takdir dan lingkungan (Sadan, 1997). Dalam proses pemberdayaan sendiri ada dua kecenderungan. Yang pertama menekankan pada proses memperkuat atau memajukan masyarakat dengan cara tertentu, kekuatan atau kemampuan untuk memberdayakan individu. Kedua, fokus pada mendorong atau memotivasi individu agar memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menentukan pilihan hidupnya.

Menurut Winarn (1988), hakikat pemberdayaan terdiri dari tiga hal yaitu: Pengembangan (enabling), meningkatkan potensi atau kekuatan (empowerment) dan menciptakan kemandirian. Pemberdayaan sendiri bertujuan untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa tidak ada manusia yang benar-benar tidak berdaya. Oleh karena itu, kekuatan ini harus digali dan kemudian dikembangkan. Oleh karena itu, pemberdayaan merupakan upaya membangun kekuatan melalui motivasi, dorongan, pengakuan dan upaya mengembangkan potensi diri. Tujuan akhir dari pemberdayaan adalah

kemandirian. Maka dapat dipahami pemahaman terkait pemberdayaan sebagai berikut:

- Daya dipahami sebagai kapasitas yang harus dimiliki masyarakat agar dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara mandiri.
- Pemberdayaan adalah proses bertahap yang harus dilakukan untuk memperoleh dan meningkatkan kekuasaan agar masyarakat dapat mandiri.

Di sisi lain, Paul (1987) dalam Priyono dan Pranarka (1996) berpendapat bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga kesadaran dan kekuasaan politik diperkuat pada kelompok rentan dan dampaknya terhadap “proses dan hasil pembangunan” ditingkatkan. Sementara itu, menurut Friedman (1992), konsep pemberdayaan menekankan supremasi politik melalui otonomi keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat berdasarkan sumber daya pribadi, partisipasi langsung, demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Menurut para ahli tersebut, konsep pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, yaitu: Pertama, orientasi primer adalah kecenderungan suatu proses yang memberikan atau mengalihkan kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (power) kepada masyarakat atau individu untuk memperoleh kekuasaan lebih. Proses ini juga dilengkapi dengan upaya pembangunan aset fisik untuk mendukung pengembangan kemandirian organisasi. Kedua, kecenderungan sekunder lebih menekankan pada pemberian inspirasi, dorongan, atau motivasi kepada individu yang memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya melalui proses dialogis.

Di dalam penelitian ini, pemberdayaan yang dimaksud adalah pemberdayaan terhadap anak putus sekolah yang berada di Kabupaten Magelang. Pemberdayaan anak adalah proses pemberian keterampilan yang bertujuan memotivasi anak untuk memperoleh kekuasaan dan memaksimalkan kemampuannya untuk mengarahkan tindakan. Pemberdayaan anak juga merupakan upaya strategis untuk menolong pekerja anak dan mencegah adanya masalah lain, baik dalam menghindari eksploitasi tempat kerja maupun dalam masalah perilaku.

1.5.6. Tinjauan Teori Pekerja Anak

Pekerja anak adalah pekerjaan anak di bawah umur. Namun, pekerja anak memiliki arti negatif sebagai pekerjaan yang melanggar hak anak, masa kanak-kanak, potensi dan martabat manusia, serta perkembangan fisik dan mental. Penggunaan pekerja anak dilarang keras jika mengakibatkan pekerjaan yang secara mental, fisik, sosial atau moral berbahaya bagi anak-anak dan menghilangkan kesempatan mereka untuk bersekolah, memaksa mereka untuk meninggalkan sekolah lebih awal atau mencoba menggabungkan pendidikan dengan kerja keras dan lama.

Adapun bentuk-bentuk pekerja anak menurut Pasal 3 Konvensi ILO No. 182 adalah :

- a) Semua bentuk perbudakan atau praktik serupa perbudakan, seperti ini termasuk penjualan dan perdagangan anak, perbudakan utang dan perbudakan, dan kerja paksa, termasuk perekrutan paksa anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata;

- b) Menggunakan, menyediakan atau menawarkan seorang anak untuk prostitusi, produksi pornografi atau pertunjukan pornografi;
- c) Menggunakan, memperoleh atau menyediakan anak untuk kegiatan ilegal, khususnya untuk pembuatan dan perdagangan obat-obatan, sebagaimana didefinisikan dalam konvensi internasional yang relevan;
- d) Pekerjaan yang, karena sifat atau kondisi pelaksanaannya, kemungkinan besar akan mempengaruhi kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

Adapun faktor – faktor penyebab anak bekerja adalah sebagai berikut :

1) Tingkat pendidikan orang tua yang rendah

Semakin rendah tingkat pendidikan orang tua, semakin rendah peluang pekerja anak untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang baik. Pendidikan orang tua juga dapat mempengaruhi minat anak terhadap sekolah dan kesadaran anak akan pentingnya pendidikan.

2) Kemiskinan

Keadaan keuangan keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan juga menjadi faktor penentu keputusan anak untuk bekerja. Kondisi tersebut mendorong mereka untuk melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang dan pendidikan. Ketidakmampuan keuangan keluarga dapat mempengaruhi rendahnya produktivitas tenaga kerja, malnutrisi dan kurangnya perawatan kesehatan, yang menyebabkan berkurangnya kapasitas kerja, kelelahan dan kerentanan terhadap kecelakaan dan penyakit.

3) Faktor budaya/ tradisi/ kebiasaan

Terlepas dari budaya orang tua yang menganggap pekerja anak sebagai tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat, anak-anak dipekerjakan sebagai pekerja agar mereka mendapat pendidikan dan bekal terbaik untuk hidup di masyarakat ketika anak sudah dewasa masyarakat siap. . Tanpa disadari, budaya, tradisi dan adat ini menjadikan anak-anak mereka menjadi pekerja anak di saat belum waktunya bekerja.

Pada dasarnya, pekerja anak melanggar hak asasi anak, karena berdampak buruk bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial anak. Dampak negatif pekerja anak terhadap anak itu sendiri adalah sebagai berikut:

1) Dampak pekerjaan terhadap perkembangan fisik anak

Secara fisik, pekerja anak lebih rentan dibandingkan orang dewasa karena tubuhnya masih dalam usia muda. Pekerja anak dapat mempengaruhi kesehatan fisik mereka karena pekerjaan yang mereka lakukan dapat menyebabkan kecelakaan dan penyakit. Dampak kecelakaan terhadap pekerja anak dapat berupa luka dan luka akibat tergores, tersayat, terpukul, terbentur, dll, namun kondisi yang menimbulkan penyakit dapat berupa kondisi kerja yang sangat panas atau terlalu dingin dan kebisingan. berbagai tempat kerja, menghirup debu, asap lengket termasuk bahan kimia, asap dari tinta sablon, tempat kerja yang memungkinkan pelecehan seksual, dll. Silau, demam, menggigil, kerusakan sistem saraf (gangguan kemampuan mental, ingatan buruk, rasa tidak enak), kulit, ginjal, paru-paru, sesak napas, batuk, gangguan pendengaran, kontraksi seksual dan penyakit lainnya, penyakit menular (IMS / HIV / AIDS)).

2) Dampak pekerjaan terhadap perkembangan emosi anak

Pekerja anak bersifat eksploitatif, berbahaya, merendahkan dan mengucilkan. Pekerja anak sering disalahgunakan dan diabaikan oleh majikan dan pekerja dewasa lainnya. Dampak dari pekerja anak adalah kemarahan, dendam, sikap kasar terhadap teman sebaya, kurang kasih sayang terhadap orang lain dan perasaan empati terhadap orang lain.

3) Dampak pekerjaan terhadap perkembangan sosial anak

Pekerja anak tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan anak-anak yang umum seperti: Kesempatan untuk bermain, bersekolah, berinteraksi dengan teman sebaya, tidak mendapatkan pendidikan dasar yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah hidup, berinteraksi dengan orang lain, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat dan menikmati hidup. Tentu saja, mereka kebanyakan tumbuh sebagai anak yang pasif dan egois. Akibatnya, anak sering bermasalah dengan hubungan dengan orang lain, kehilangan kepercayaan diri, dan merasa terhina. Anak-anak, di sisi lain, adalah generasi muda penerus bangsa yang harus diberi kesempatan terbesar untuk tumbuh.

1.5.7. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian terkait yang relevan dan dapat dijadikan acuan untuk mendukung penelitian ini. Oleh karena itu, untuk mengembangkan kajian keilmuan maka peneliti merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Berikut merupakan beberapa karya penelitian yang ditemukan peneliti, diantaranya adalah :

Tabel 1.3.
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti,Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Andhi Nur Rahmadi, 2019.	Mengetahui sejauhmana implementasi program pengurangan pekerja anak dalam rangka mendukung program keluarga harapan di Kabupaten Probolinggo	Kualitatif-deskriptif.	Pelaksanaan program PPA-PKH di Kabupaten Probolinggo antara pemerintah pusat, kabupaten dan daerah masih belum lengkap karena informasi penerima manfaat program masih belum jelas. Oleh karena itu, agar program PPA-PKH dapat berfungsi secara maksimal, lembaga, LSM dan yang terpenting keluarga anak harus menyetujui program ini.

Nama Peneliti, Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Dewi Rostyaningsih, 2015.	Mendiskripsikan Implementasi Program Penarikan Pekerja Anak Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang, Menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Program PPA-PKH di Kabupaten Magelang	Kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara	Implementasi PPA-PKH di Kabupaten Magelang, jika dilihat dari segi produktivitas kelompok sasaran telah memenuhi target, namun dari segi linearitas dari kesesuaian prosedur, waktu, biaya, tempat dan pelaksana masih perlu ditingkatkan. Dari segi efisiensi, program ini cukup efisien. faktor pendorong program ini adalah substansi kebijakan, dan motivasi dari pelaksana program. Faktor penghambat program yakni penyalahgunaan wewenang, interaksi jejaring kerja belum berjalan dengan baik, partisipasi kelompok sasaran masih kurang, sumber daya masih kurang.

Nama Peneliti, Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Ajeng Resi Krisdyawati, Dr. AP. Tri Yuniningsih, M.Si, 2019.	Mendesripsikan dan menganalisis efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kota Semarang, mengetahui faktor pendorong dan penghambat ketidakefektivan Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.	Kualitatif – deskriptif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Pendekatan sumber untuk mencapai keefektifan layanan pemberdayaan dan perlindungan anak di Semarang masih belum efektif karena pemerintah kota masih belum memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana cara melaporkan penanganan insiden kekerasan di Semarang. Faktor internal yang mempengaruhi program adalah infrastruktur, upaya sosialisasi, anggaran terbatas, dan sumber daya manusia yang minim. Faktor eksternal dalam program ini adalah kerjasama dengan pejabat di luar Semarang, termasuk kepolisian dan pengadilan Semarang.

Nama Peneliti,Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
St. Nurhijriah j., Budi Setiawati, Rulinawaty Kasmad, 2018.	Mengetahui implementasi program pusat pelayanan kesejahteraan anak integratif di Kabupaten Gowa.	Kualitatif – deskriptif	Kehadiran dan respon positif kelompok sasaran mendukung adanya program pusat kesejahteraan anak integratif, karena program pusat kesejahteraan anak integratif bekerja dengan baik dengan anak-anak yang masalahnya dapat diselesaikan. Namun masih ada respon negatif seperti sosialisasi yang masih kurang dan belum ada kantor pengaduan di tingkat kecamatan atau desa.
Robertus Raga Djone,2019	Mengetahui perspektif guru tentang pekerjaan anak dan dampak bekerja pada kegiatan belajar anak di lima SMP di Indonesia, perspektif guru tentang kebijakan dan praktik yang ada untuk meningkatkan pembelajaran pekerja anak	Kualitatif, dengan teknik wawancara	Perspektif guru tentang pekerjaan anak dapat disimpulkan bahwa, anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan dengan intensitas tinggi mengalami gangguan belajar yang signifikan. Kelelahan dan kurangnya waktu untuk belajar adalah beberapa faktor utama yang menghambat belajar anak-anak ini.

Nama Peneliti,Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Itang Ede Eggbung, 2019.	Mengkaji literasi sebagai alat yang benar-benar menuju pemberdayaan anak perempuan yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan dalam keluarga khususnya dan masyarakat yang lebih luas.	Kualitatif	MUTE organisasi yang merepresentasikan literasi memberikan dampak positif bagi kehidupan Fofo pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Jika MUTE mampu memberdayakan semua anak jalanan, maka masyarakat akan menjadi lebih baik, karena tidak akan ada lagi anak jalanan yang melakukan pencurian kecil-kecilan.
Azizah Khoirun Nikmah, 2018.	Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program PPA-PKH Tahun 2016 untuk mengembalikan keberfungsian sosial pekerja anak di Kabupaten Lumajang pada Shelter Krai.	Kualitatif	Implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak dilaam rangka mendukung Program Keluarga Harapan Tahun 2016 pada Shelter Krai dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap setelah program selesai. Adapun kendala yang dirasakan yakni mengubah tatanan pola pikir anak-anak dari anak yang menjadi pekerja sampai dengan anak-anak yang bersekolah dengan normal.

Nama Peneliti,Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Siti Fijriah Nursiam, 2017.	Mengetahui sejauh mana peranan International Labour Organization melalui International programme on the Eliminating of Child Labour dalam menanggulangi pekerja anak di Indonesia.	Kualitatif	Upaya ILO mendukung program Indonesia untuk mengatasi kasus pekerja anak tercantum dalam program IPEC yang direncanakan dalam program yaitu Rencana Aksi Nasional Penghapusan Tenaga Kerja Anak-anak (RANPBPTA), Pendidikan dan Pelatihan untuk lansia agar dapat memiliki keahlian dalam memaksimalkan peluang dan mengurangi dampak negatif para pendorong perubahan global.
Lindra Yunita Putriani, 2019.	Menjelaskan alasan yang memotivasi anak bekerja di peran emas ilegal di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak bekerja secara sukarela, meskipun keadaan keuangan keluarga memaksa mereka untuk melakukannya dan peran orang dewasa sebagai pencari nafkah utama masih kurang. Namun, mereka menganggap risiko emas ilegal. pilihan yang masuk akal bagi mereka.

Nama Peneliti,Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Dian Purnama Putra, Anwar, Nur Hasanah, 2019.	Mendesripsikan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kota Samarinda.	Deskriptif Kualitatif	Perda Kota Samarinda No. 6 Tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Samarinda masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain: Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam perda, kurangnya pemetaan pekerja anak di kota Samarinda, anggaran untuk pelaksanaan perda No 6 Tahun 2015. Samarinda masih sangat minim. ,perubahan implementasi kebijakan, dan terakhir ada kebijakan yang memiliki fungsi yang sama dan cenderung diprioritaskan dalam implementasinya.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Andhi, Nur Rahmadi (2019) dengan judul “Implementasi PPA-PKH di Kabupaten Probolinggo 2013 (Penarikan pekerja anak ke sekolah formal”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak mendukung

Program Keluarga Harapan di Kabupaten Probolinggo. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program PPA-PKH di Kabupaten Probolinggo masih kurang terkoordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah, karena informasi penerima manfaat program masih belum jelas. Oleh karena itu, agar program PPA-PKH dapat berjalan optimal, maka lembaga, LSM dan yang terpenting keluarga anak harus menyetujui program ini.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Dewi Rostyaningsih (2015) yang berjudul “Implementasi Program Penarikan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program Penarikan Pekerja Anak (PPA-PKH) pada program Keluarga Harapan di Kabupaten Magelang dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat pelaksanaan program PPA-PKH di Kabupaten Magelang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Implementasi PPA-PKH di Kabupaten Magelang, jika dilihat dari segi produktivitas kelompok sasaran telah meenuhi target, namun dari segi linearitas dari biaya, waktu, prosedur, tempat dan pelaksana yang perlu ditingkatkan. Dari segi efisiensi, program ini cukup efisien. faktor pendorong program ini adalah substansi kebijakan, dan motivasi dari pelaksana program. Faktor penghambat program yakni penyalahgunaan wewenang, interaksi jejaring kerja belum berjalan dengan baik, partisipasi kelompok sasaran masih kurang, sumber daya masih kurang.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Resi Krisdyawati, dan Dr. AP. Tri Yuniningsih, M.Si, (2019) yang berjudul “Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak Di Kota Semarang”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kota Semarang untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan dinas pemberdayaan perempuan dan untuk pencegahan dan perlindungan anak. Perlindungan di Kota Semarang Anti kekerasan terhadap anak di Kota Semarang Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan sumber untuk mencapai keefektifan layanan pemberdayaan dan perlindungan anak di Semarang belum efektif karena pemerintah kota masih belum memiliki pemahaman yang jelas tentang cara pelaporan penanganan insiden kekerasan di Semarang. Faktor internal yang mempengaruhi program adalah infrastruktur, upaya sosialisasi, anggaran terbatas, dan sumber daya manusia yang minim. Faktor eksternal dalam program ini adalah kerjasama dengan pejabat di luar Semarang, termasuk kepolisian dan pengadilan Semarang.

Penelitian keempat, dilakukan oleh St. Nurhijriah, dkk (2018) yang berjudul “Implementasi Program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) di Kabupaten Gowa”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui pelaksanaan program terpadu pusat kesejahteraan anak di Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan kelompok sasaran dan reaksi positif kelompok sasaran mendukung keberadaan program Balai Perlindungan Anak Terpadu, karena program Balai Perlindungan Terpadu bekerja dengan baik dengan anak-anak yang masalahnya dapat diselesaikan. Namun masih ada respon negatif seperti sosialisasi yang masih kurang dan belum ada kantor pengaduan di tingkat kecamatan atau desa.

Kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Robertus Raga Djone, (2019) dengan judul penelitian “Child workers and inclusive education in Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif guru tentang pekerjaan anak dan dampak bekerja pada kegiatan belajar anak di lima SMP di Indonesia, perspektif guru tentang kebijakan dan praktik yang ada untuk meningkatkan pembelajaran pekerja anak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan perspektif guru tentang pekerjaan anak dapat disimpulkan bahwa, anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan dengan intensitas tinggi mengalami gangguan belajar yang signifikan. Kelelahan dan kurangnya waktu untuk belajar adalah beberapa faktor utama yang menghambat belajar anak-anak ini. pekerja anak dengan karakteristik fisik dan psikologis yang khas memerlukan pendidikan yang disesuaikan.

Keenam yaitu penelitian yang dilakukan oleh Itang Ede Eggbung, (2019) dengan judul penelitian “Literacy and the Girl-Child Empowerment for Sustainable Development: A Study of Amma Darko’s”. Penelitian ini bertujuan

mengkaji literasi sebagai alat yang benar-benar menuju pemberdayaan anak perempuan yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan dalam keluarga khususnya dan masyarakat yang lebih luas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan MUTE yang merupakan organisasi yang merepresentasikan literasi memberikan dampak positif bagi kehidupan Fofo pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Jika MUTE mampu memberdayakan semua anak jalanan, maka masyarakat akan menjadi lebih baik, karena tidak akan ada lagi anak jalanan yang melakukan pencurian kecil-kecilan.

Penelitian ketujuh, dilakukan oleh Azizah Khoirun Nikmah, (2018) yang berjudul “Implementasi Program PPA-PKH Tahun 2016 Untuk Mengembalikan Keberfungsian Sosial Pekerja Anak (Studi Terhadap Kegiatan Kepelatihan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Pada Shleter Krai)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program PPA-PKH Tahun 2016 untuk mengembalikan keberfungsian sosial pekerja anak di tempat shelter Krai Kabupaten Lumajang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengurangan pekerja anak sehubungan dengan dukungan program Keluarga Harapan 2016 di dua shelter yang mengatur tata cara pelaksanaannya mulai dari persiapan hingga pelaksanaan hingga tindak lanjutnya berada di tempat yang sama. Program sudah siap. Hambatan lain yang dirasakan adalah mengubah cara berpikir anak tentang anak bekerja yang biasanya bersekolah.

Kedelapan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siti Fijriah Nursiam, (2017) dengan judul penelitian “Peranan International Labour Organization

(ILO) melalui International programme on the Eliminating of Child Labour (IPEC) Dalam Menanggulangi Pekerja Anak di Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran Organisasi Perburuhan Internasional dalam Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak dalam memerangi pekerja anak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa ILO mendukung program Indonesia untuk memerangi kasus pekerja anak. Kegiatan tersebut dirinci dalam rencana IPEC atau Rencana Aksi Nasional Penghapusan Pekerja Anak (RANPBPTA), program Pendidikan dan Pelatihan. Sehingga para lanjut usia memiliki keahlian yang diperlukan untuk memaksimalkan peluang mereka dan memitigasi efek negatif dari penggerak perubahan global.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Lindra Yunita Putriani, (2019) yang berjudul “Alasan Bekerja: Studi Kasus Pekerja Anak Emas Ilegal Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan meliputi wawancara ekstensif dan teknik observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak bekerja secara sukarela, meskipun terpaksa karena keadaan eksternal seperti keuangan keluarga yang lebih lemah dan kurangnya peran orang dewasa sebagai pencari nafkah utama terpaksa melakukannya. manfaat dan risiko yang terlibat dalam mempertimbangkan emas ilegal sebagai pilihan paling masuk akal bagi mereka.

Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Dian Purnama Putra, Anwar, Nur Hasanah, (2019) yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kota Samarinda”.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kota Samarinda. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kawasan Bebas Pekerja Anak di Samarinda masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain: Kurangnya koordinasi antar pejabat yang berwenang di tatanan daerah, kurangnya investigasi pekerja anak di kota Samarinda, pelaksanaan anggaran 2015 perda No. 6. Samarinda masih sangat minim. ,perubahan implementasi kebijakan, dan terakhir ada kebijakan yang memiliki fungsi yang sama dan cenderung diprioritaskan dalam implementasinya..

1.5.8. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, objek yang akan diteliti adalah pekerja anak yang terdapat di Kabupaten Magelang. hal ini dikarenakan masih ditemukan banyak anak yang masih dibawah 15 tahun menjadi pekerja anak (*child labour*) di Kabupaten Magelang dengan alasan yaitu tekanan ekonomi yang dialami orangtuanya. Berdasarkan data, jumlah pekerja anak di wilayah Megelang sebanyak 150 anak pada tahun 2015, 63 anak pada tahun 2016, dan 120 anak pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat pekerja anak yang tidak bekerja sesuai Pasal 69(2) UU No. 13 Tahun 2013 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia: KEP 235/MEN/2003. Dalam penelitian ini, peneliti juga ingin mendalami lebih dalam implementasi kebijakan Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Idaman (PPA-PKH). Dalam

Mewujudkan Pemberdayaan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Magelang. Berikut adalah bagan dari kerangka berpikir yang telah dipaparkan dari penjelasan sebelumnya.

Bagan 1. Kerangka Berpikir



Sumber : Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No 125 Tahun 2015 & Teori Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975).

1.6. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep yakni proses atau upaya mengukur serta menganalisis konsep yang digunakan agar lebih mudah dipahami baik oleh peneliti maupun pembaca. Secara konseptual, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Magelang. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja yang terdapat dalam Implementasi Kebijakan Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Magelang.

1.6.1. Implementasi Kebijakan Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Magelang

Dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan konsep implementasi terhadap Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Magelang. dalam konsep implelementasi, penelitian ini berusaha menjelaskan apakah Kebijakan Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) yang diimplementasikan di Kabupaten Magelang ini telah efektif dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dan bagaimana hasil, dampak, atau manfaat yang telah dirasakan dengan adanya Kebijakan Program

Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA), Kegiatan PPA-PKH dilaksanakan melalui pendekatan pendampingan, yakni proses sistematis dalam rangka mendampingi atau memfasilitasi pekerja anak kembali ke pendidikan agar kembali ke pendidikan agar anak mampu mengembangkan sumberdaya atau potensinya untuk perubahan hidup yang lebih baik. Dalam menilai ketercapaian tujuan Kebijakan Program Pengurangan Pekerja Anak - Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2015 Tentang Kegiatan Pengurangan Pekerja Anak Dalam Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA- PKH) digunakan dimana terdapat 3 tahap pendampingan yaitu sebagai berikut :

- 1) Pendampingan Pra-shelter dengan melakukan kunjungan rumah untuk verifikasi dan validasi data, serta mengajak anak untuk mengikuti pendampingan di shelter
- 2) Pendampingan di Shelter dengan melakukan pembinaan selama 1 bulan di Shelter untuk memberikan motivasi dan pembekalan kesiapan memasuki pendidikan
- 3) Pembinaan pasca shelter dilakukan dengan memelihara kesiapan memasuki pendidikan dan merekomendasikan pekerja anak untuk kembali

pada pendidikan, serta memantau pelaksanaan pengembalian anak ke sekolah.

1.6.2. Faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Kebijakan Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Magelang

Implementasi kebijakan harus diukur, dihitung dan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi dan melaporkan tingkat kinerja kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh unit kerja. Tanpa indikator atau variabel implementasi kebijakan, maka sulit untuk menilai implementasi kebijakan/program/kegiatan, keberhasilan atau kegagalannya. Menurut Donald S. van Meter dan Carl E. Van Horn (1975), terdapat enam variabel yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi. Sehingga dalam penelitian ini, factor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Magelang akan dianalisis melalui enam variabel tersebut, yaitu :

1) Standar dan sasaran kebijakan.

Standar dan tujuan kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat diimplementasikan. Norma dan tujuan kebijakan merupakan aspek yang sangat penting agar tidak menimbulkan multitafsir dan konflik antar aktor pelaksana.

2) Sumber daya

Implementasi kebijakan tersebut tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia maupun non manusia.

3) Karakteristik agen pelaksana

Di sini, Karakteristik agen pelaksana meliputi birokrasi, norma, dan hubungan birokrasi tertentu yang mempengaruhi implementasi program.

4) Disposisi Implementor

Disposisi implementor menyangkut 3 hal yaitu : (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya dalam melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan; (c) intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh disposisi implementor.

5) Hubungan antar organisasi

Menerapkan kebijakan atau program memerlukan dukungan dan koordinasi dengan pihak berwenang. Oleh karena itu, keberhasilan program memerlukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga.

6) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

Variabel tersebut meliputi sumber daya lingkungan dan ekonomi yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana sekelompok pemangku kepentingan membantu implementasi kebijakan, karakteristik peserta, sifat opini publik di lingkungan, dan elit politik, termasuk ada atau tidaknya dukungan politik.

1.7. Argumen Penelitian

Penulis mengkaji riset penelitian dengan judul “Implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan di Kabupaten Magelang” ini untuk menjawab persoalan tentang permasalahan terkait masih

banyaknya fenomena pekerja anak dan angka putus sekolah di Kabupaten Magelang. Hal itu tentu sangat memprihatinkan karena masih banyak anak yang tak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Hal tersebut berarti tujuan negara Indonesia untuk mecerdaskan kehidupan bangsa belum tercapai. Penelitian ini juga menjawab persoalan terkait apakah implementasi program PPA-PKH sebagai upaya untuk terpenuhinya hak pendidikan pekerja anak di Kabupaten Magelang telah efektif dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap anak putus sekolah yang menjadi pekerja anak di Kabupaten Magelang. Isu tersebut merupakan isu yang sangat serius mengingat anak adalah generasi penerus bangsa dan negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak –hak anak dalam rangka pengembangan kemampuan serta minat anak, dalam hal ini adalah memastikan setiap anak memperoleh haknya untuk mengenyam pendidikan. situasi pekerja anak memungkinkan anak bekerja di lingkungan berbahaya dan berpeluang menciptakan eksploitasi. Oleh karena itu, persoalan ini memerlukan perhatian semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk berpartisipasi aktif dan terus memikul tanggung jawab tersebut.

Berdasarkan masalah tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa riset penelitian ini jika dilihat dari teori implementasi, ingin mengetahui dan menjelaskan apakah implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) yang telah berjalan di Kabupaten Magelang tersebut sudah efektif dalam mewujudkan pemberdayaan anak putus sekolah. Pekerja anak merupakan masalah serius yang berisiko menyebabkan timbulnya

berbagai masalah-masalah baru seperti anak putus sekolah, terlantar, dan bahkan masuk dalam situasi-situasi yang membahayakan diri yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak secara tidak maksimal. Hal ini tentu membuat negara Indonesia tidak memiliki banyak SDM yang kompeten dalam menghadapi persaingan global. Karena anak merupakan generasi muda penerus bangsa yang harus dijaga, diperhatikan, serta dilindungi hak-hak dan kebebasannya. Selanjutnya, jika dilihat dari teori kebijakan apakah Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) telah sesuai dan telah diimplementasikan dengan baik di Kabupaten Magelang. selain itu, riset penelitian ini juga melihat dari teori pemberdayaan yakni bagaimana Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) tersebut telah mampu memberdayakan anak putus sekolah di Kabupaten Magelang.

1.8. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan bagian penting dalam melakukan penelitian dan menentukan tindakan untuk mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus menentukan dan memilih metode yang digunakan untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya selama penelitiannya.

1.8.1. Tipe Penelitian

Pendekatan deskriptif-kualitatif digunakan sebagai jenis penelitian. Menurut Saryono (2010), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi, menemukan dan menjelaskan ciri-ciri atau ciri-ciri efek sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau dijelaskan dengan pendekatan kuantitatif. Di sisi lain, Sugiyono (2011) mengemukakan bahwa Metode penelitian

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi postpositivisme yang mempelajari keadaan benda-benda alam bukan eksperimen. Peneliti adalah instrumen kunci. Sampling sumber data ditargetkan dan seperti bola salju. Teknik survei adalah triangulasi, data analitik bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan relevansi daripada generalisasi. Informasi yang diperoleh dalam penelitian kualitatif dianalisis secara deskriptif, tanpa proses pengujian metode statistik. Penelitian ini bersifat elaboratif, di mana peneliti dapat menggali informasi secara lebih dalam terhadap obyek yang diteliti.

Pendekatan penelitian bersifat kualitatif deskriptif bertujuan memperoleh pengertian serta pemahaman atas suatu peristiwa maupun perilaku manusia dalam suatu organisasi atau institusi. Dalam pendekatan ini, data dikumpulkan sesuai dengan gambaran, kondisi, keadaan dan kenyataan dari fenomena yang diteliti, dan fenomena tersebut dijelaskan sedetail mungkin melalui pengumpulan data tersebut, sehingga pentingnya kedalaman atau detail satu dapat mendemonstrasikan ilmu yang dipelajari. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Magelang secara rinci dan detail untuk dapat menjawab berbagai permasalahan dengan menganalisis data secara mendalam.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Penentuan lokasi penelitian merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Hal

ini dikarenakan penentuan lokasi penelitian juga menentukan topik penelitian dan tujuan penelitian, sehingga pekerjaan penelitian para peneliti dapat difasilitasi. Jadi, situs penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian.

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Magelang. alasan peneliti memilih Kabupaten Magelang sebagai situs penelitian karena Kabupaten Magelang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan angka pekerja anak yang masih tinggi.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang, benda atau organisme yang bertindak sebagai sumber informasi untuk pengumpulan data penelitian. Penentuan subyek penelitian secara tepat sangat penting agar menghindari kesalahan dalam mengidentifikasi informan. Hal ini dikarenakan diharapkan informasi yang terkumpul dari informan berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

Pada penelitian ini, subjek penelitiannya adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang, pendamping Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang, dan penerima manfaat Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang. Sedangkan, subjek utamanya adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang serta pendamping *shelter* dalam Program Pengurangan Pekerja Anak – Program

Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang. Alasan peneliti mengambil subjek penelitian utama adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magelang, dan pendamping *shelter* dalam Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang, karena subjek terlibat langsung dalam topik penelitian dan memahami topik penelitian secara menyeluruh .

1.8.4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa teks, kata-kata tertulis, kalimat dan simbol yang menggambarkan atau mewakili orang, tindakan dan peristiwa dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis eksploratif ini, peneliti memfokuskan pada data kualitatif. Secara umum, ada dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif, yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Data Kuantitatif

Sugiyono (2015) mendefinisikan data kuantitatif sebagai angka atau data kualitatif numerik. Data kuantitatif adalah data yang dapat berupa angka atau bilangan. Dalam bentuk bab ini, data kuantitatif dapat diolah menggunakan rumus matematika atau dianalisis menggunakan sistem statistik.

2) Data Kualitatif

Sugiyono (2015) mendefinisikan data kualitatif sebagai data yang berupa kata-kata, grafik dan gambar. Data kualitatif adalah data yang diterangkan secara lisan atau secara lisan atau lisan. Informasi kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara.

1.8.5. Sumber Data

Secara umum data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian di lapangan dan informasi yang diperoleh secara tidak langsung. Data yang diperoleh secara langsung disebut sebagai data primer, data yang diperoleh secara tidak langsung disebut sebagai data sekunder (Sukanto, 2014).

1) Data Primer

Data primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang berasal langsung dari sumber pertama (tanpa perantara) atau melalui individu atau kelompok. Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sementara itu, peneliti dalam penelitian ini memperoleh data primer melalui kegiatan wawancara mendalam (*indeph interview*).

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi penelitian yang peneliti peroleh secara tidak langsung melalui media (diperoleh atau disimpan oleh pihak lain). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh peneliti melalui observasi dan studi literatur diperoleh melalui kajian sumber –sumber literatur referensi jurnal-jurnal, dan bahan bacaan lainnya yang relevan dan sesuai dengan topik penelitian ini.

1.8.6. Teknik dan Pengumpulan Data

Penelitian yang berjudul “Implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan di Kabupaten Magelang” ini, menggunakan metode

deskriptif kualitatif. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah :

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Teknik pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah teknik yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang perspektif partisipan terhadap topik penelitian. Tujuan wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mengkontekstualisasikan orang, peristiwa, kegiatan, organisasi, emosi, motif, reaksi atau persepsi, tingkat dan bentuk partisipasi dalam rangka merekonstruksi berbagai hal.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap kondisi lapangan. Jenis observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi non partisipan. Observasi non-partisipan, peneliti mengumpulkan informasi yang diperlukan tanpa menjadi bagian dari situasi.

c. Studi literatur

Studi literatur juga digunakan pada penelitian ini sebagai teknik pendukung. Studi literatur diperoleh melalui literatur refeensi jurnal-jurnal, dan bahan bacaan lainnya yang relefan dan sesuai dengan topik penelitian ini.

Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan

di Kota Magelang” menggunakan teknik *non - probability sampling*. Teknik non-probability sampling adalah teknik pengumpulan data atau sampel sehingga semua data kemungkinan besar akan dipilih sebagai sampel yang tidak sama. Ini didasarkan pada pedoman peneliti ketika memutuskan elemen sampling apa yang akan digunakan. Pengambilan sampel dengan metode *non-probability sampling* didasarkan pada kriteria tertentu seperti penilaian, status, kuantitas, dan kesukarelaan..

Adapun teknik *non-probability sampling* yang akan digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

a. *puposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan karakteristik objek penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber penelitian ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan TransMigrasi Kabupaten Magelang dan pendamping program PPA-PKH Kabupaten Magelang.

b. *Snowball sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan penelusuran sampel sebelumnya. Menurut Sugiyono (2014), *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang awalnya berjumlah kecil tetapi berkembang.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses mencari dan membandingkan secara sistematis informasi yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, membaginya menjadi unit-unit, mensintesiskannya, mengorganisasikannya ke dalam model-

model, dan memilih yang akan digunakan. Penelitian dilakukan dan kesimpulan ditarik dengan cara yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Model analisis data yang digunakan peneliti adalah etnografi yaitu dari catatan lapangan yang kemudian diberi kode, diklasifikasikan atau dikategorikan kemudian disusun secara sistematis, kemudian tema disusun berdasarkan hasil analisis data. Teori yang relevan dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi atau sebagai alat analisis bila diperlukan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sebelum memasuki lapangan, selama kunjungan lapangan, dan setelah selesai lapangan.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles & Huberman (1992: 16) terdiri dari :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menggabungkan dan menyeragamkan semua jenis data yang berbentuk tulisan untuk dianalisis. Peneliti mereduksi informasi yang terkumpul di lapangan dengan menggabungkan, meringkas dan memilih informasi penting dari hasil wawancara subjek.

b. Penyajian Data

Penyajian data, yaitu pengolahan informasi setengah jadi, yang koheren dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur yang jelas. Peneliti menggunakan penyajian data dengan deskripsi singkat dalam bentuk narasi untuk menjelaskan kebijakan Program Pengurangan Pekerja Anak - Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) dalam pemberdayaan anak putus sekolah di Kabupaten Magelang.

c. Pengambilan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari penelitian kualitatif yang mengarah pada jawaban atas pertanyaan penelitian yang disajikan. Pada tahap ini, perekaman dilakukan dengan pola dan tema yang sama. Tujuan verifikasi data adalah untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi yang ditemukan.

Untuk menghindari kesalahan, kebenaran data yang akan dianalisis harus diperiksa dengan cara berikut :

a. Pengumpulan data secara terus menerus pada subyek penelitian yang sama.

Hal ini dilakukan agar data penelitian yang didapat melalui subjek penelitian bersifat mendalam dan luas. Sehingga dalam menganalisis (interpretasi) data dapat mempertajam fokus pengamatan dan memperdalam topik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Triangulasi pada sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan

Metode triangulasi digunakan untuk mencapai validitas konvergen dan menguji tingkat validitas eksternal, (Denzin, 1978). Konsep triangulasi didasarkan pada penggunaan beberapa sumber (data, metode, dan peneliti) dan dapat menetralkan bias penelitian yang spesifik terhadap sumber data, peneliti, atau metode tertentu (Jick 1979). Teknik triangulasi dilakukan dengan cara mengecek keabsahan data dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan objek penelitian. Teknik triangular bertujuan untuk mempelajari perbedaan antara

informasi yang diterima oleh seorang informan (informan) dengan informan lainnya sehingga diperoleh informasi yang benar dan akurat.

c. Pengecekan oleh subyek penelitian.

Hal ini dilakukan menghindari bias – bias dalam penelitian. Pengecekan informasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana informasi yang diterima sesuai dengan informasi yang diberikan oleh data. Informasi yang diperoleh digunakan untuk menulis laporan sesuai dengan maksud informan.

1.8.8. Kualitas Data (*goodness criteria*)

Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menelaah dan menentukan keabsahan data yang peneliti terima dari sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi bias dalam pengumpulan dan analisis data sebanyak mungkin. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif mengacu pada keakuratan hasil penelitian yang mencerminkan keadaan dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat.

Norman K. Denkin yang dikutip oleh Mudjia Rahardjo (2012) mendefinisikan triangulasi sebagai kombinasi atau gabungan dari berbagai metode yang digunakan untuk mempelajari fenomena yang berkaitan dari sudut dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antarpeleliti (apabila penelitian dilakukan dalam kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.

1. Triangulasi metodologi adalah triangulasi yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan survei. Oleh karena

itu, peneliti dapat menggunakan wawancara dan observasi untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya untuk membuktikan kebenarannya. Selain itu, peneliti dapat menggunakan berbagai informan untuk memverifikasi kebenaran informasi. Triangulasi ini dilakukan ketika informasi yang diperoleh tidak pasti, tergantung subjek atau peneliti.

2. Triangulasi antarpeleliti adalah triangulasi yang melibatkan lebih dari satu orang untuk pengumpulan dan analisis data. Teknik ini digunakan untuk memperkaya kumpulan data berdasarkan informasi yang digali sesuai dengan objek yang diteliti. Namun, yang diundang untuk menggali data haruslah seseorang yang memiliki pengalaman penelitian sebelumnya dan bebas dari konflik kepentingan, sehingga tidak terlalu merugikan peneliti dan menimbulkan bias baru menurut triangulasi.

3. Triangulasi sumber informasi adalah triangulasi dimana kebenaran suatu informasi diperiksa dengan menggunakan berbagai metode dan sumber informasi. Misalnya, selain wawancara dan observasi, peneliti dapat menggunakan observasi partisipan, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, dokumen resmi, catatan atau tulisan pribadi, dan gambar atau foto. Masing-masing metode tersebut kemudian menyajikan bukti atau data yang berbeda, yang kemudian memberikan perspektif yang berbeda terhadap realitas yang diselidiki.

4. Triangulasi teoritis. Hasil akhir penelitian kualitatif adalah pernyataan informasi atau tesis. Data ini kemudian dibandingkan menggunakan perspektif teoretis terkait untuk menghindari bias peneliti individu dalam hasil atau kesimpulan. Selain itu, triangulasi teori dapat menambah kedalaman pemahaman

selama peneliti dapat menelaah secara menyeluruh informasi teori dari hasil analisis data yang diperoleh.

Dalam penelitian terkait “Implementasi Kebijakan Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Magelang”, Triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber. Informasi yang lengkap tersebut kemudian divalidasi oleh berbagai sumber sehingga dapat dijadikan dasar penarikan kesimpulan. . Diharapkan melalui teknik triangulasi tersebut, dapat diperoleh validitas data yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut :

➤ Derajat kepercayaan (*credibility*)

Kriteria tersebut berfungsi membantu melakukan penyelidikan untuk mencapai kredibilitas pernyataan dan menunjukkan kredibilitas pernyataan melalui bukti kehidupan nyata yang diselidiki oleh peneliti. Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, peneliti memperkuat hasil, meningkatkan kekokohan penelitian, menganalisis kasus negatif, menggunakan teknik triangulasi, menggunakan referensi dan menggunakan ulasan anggota yang membandingkan data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan penyedia data (Sugiyono, 2009:270).

➤ Keteralihan (*transferability*)

Transferabilitas adalah validitas eksternal penelitian kualitatif. Penjelasan rinci dan mendalam tentang hasil dan konteks penelitian dapat diperoleh. Portabilitas tergantung pada kesamaan konseptual dari konteks pengirim dan

penerima. Transmisi ini bertujuan agar orang lain dapat memahami hasil penelitian, sehingga peneliti harus melaporkan secara detail, jelas, sistematis dan terpercaya (Sugiyono, 2009:276).

➤ Kebergantungan/reliabilitas (*dependability*)

Penelitian dapat dikatakan *dependable* apabila orang lain meniru atau dapat mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji reliabilitas dilakukan dengan cara memeriksa keseluruhan proses penelitian. Metode tersebut dilakukan oleh auditor atau supervisor independen untuk meninjau keseluruhan kegiatan penelitian peneliti (Sugiyono, 2009:277).

➤ Kepastian/dapat dikonfirmasi (*confirmability*)

Pengujian kepastian atau kepastian dalam penelitian kualitatif dikenal dengan pengujian objektivitas penelitian. *Verifiable test* memverifikasi hasil penelitian terkait dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian yang dilakukan merupakan tugas dan proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar verifikasi.